

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Inspektorat Kabupaten Grobogan menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kab. Grobogan 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Grobogan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Grobogan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi.

Tujuan disusunnya dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun 2024 antara lain :

- 1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
- 2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Inspektorat Kabupaten Grobogan dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
- 3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Grobogan
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Grobogan
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Grobogan
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan
3.2	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023⁴

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kab. Grobogan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Grobogan

Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Grobogan, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakandilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Inspektorat Kab. Grobogan Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Inspektorat. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program ,Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
								Target Renja Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d th berjalan	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan
01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase hasil penjaminan kualitas penilaian Kapabilitas APIP - Persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	60%	60%	60%	60%	60%	60%	180%	30%
						60%	60%	60%	60%	60%	180%
01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP - Jumlah Temuan dan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
						1015 temuan	201 temuan	204 temuan	244 temuan	119%	204 temuan	649 temuan	63%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program ,Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
								Target Renja Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d th berjalan	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
					rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti - Periode Pengawasan Pungutan Liar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		12 bulan	100%
01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Risiko	64%	20%	40%	60%	150%	60%	140	218%
01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Manajemen Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah	207 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	48 dokumen	160%	48 Dokumen	126 dokumen	60%
01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	48 OPD	30 OPD	30 OPD	49 OPD	163%	49 OPD	128 OPD	266%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Grobogan

Inspektorat Kab. Grobogan mengampu misi ke-4 dari Kepala Daerah terpilih yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Misi ini merupakan tujuan dari Inspektorat Kab. Grobogan yang dijabarkan dalam sasaran Inspektorat yaitu: "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sesuai dengan perannya selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat Kab. Grobogan telah menetapkan program pengawasan yang tertuang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang diatur dengan Keputusan Inspektur Kab. Grobogan, dan berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kab. Grobogan sebagaimana pada tabel 2.2

Capaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Grobogan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Grobogan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kab. Grobogan Tahun 2021-2026

Tabel 2.2`
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kab. Grobogan

[illegible]

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Penentuan Isu-isu strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor kekuatan (Strenghts) :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan adanya pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Inspektorat Kab. Grobogan.

Faktor Kelemahan (Weakness):

1. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.
2. Kurangnya jumlah auditor dan P2UPD dalam kegiatan pengawasan.

Faktor Tantangan (Threats):

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tuntutan kinerja yang optimal , dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.
5. Sebagian Perangkat Daerah belum pelaksanaan/Implementasi SAKIP.

Faktor Peluang (Oppurtinity):

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

2.3.2. Formulasi Isu-Isu Penting untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.

2. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.
 3. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kab. Grobogan.
 4. Peningkatan Kapabilitas APIP.
- Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Pemerintah Kab. Grobogan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik Lembaga Pengawas eksternal, Bupati/Wakil Bupati yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kab. Grobogan Tahun 2024. Pada pelaksanaan Konsultasi Publik, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Inspektorat Kabupaten Grobogan tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Grobogan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
dari Pemangku Kepentingan untuk Perencanaan Tahun 2024 Kab. Grobogan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Grobogan	- Persentase hasil penjaminan kualitas penilaian Kapabilitas APIP - Persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	60% 60%	264.328.000	PROGRAM PENYELENGG A RAAN PENGAWASAN	Kab, Grobogan	Persentase hasil penjaminan kualitas penilaian Kapabilitas APIP Persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	60% 60%	264.328.000	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Grobogan	- Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP - Jumlah Temuan dan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti - Periode Pengawasan Pungutan Liar	Level 3 204 Temuan 12 bulan	264.328.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab, Grobogan	- Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP - Jumlah Temuan dan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Periode Pengawasan Pungutan Liar	100% 100%	264.328.000	
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Grobogan	Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Risiko	100%	153.020.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab, Grobogan	Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Risiko	100%	153.020.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Kab. Grobogan	Jumlah dokumen Manajemen Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah	48 Doku men	111.308.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Kab. Grobogan	Jumlah dokumen Manajemen Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah	48 Doku men	111.308.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Fasilitasi Pengawasan					Fasilitasi Pengawasan					
2	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Grobogan	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	49 OPD	37.370.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Grobogan	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	49 OPD	37.370.000	
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi SAKIP - Cakupan pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja PD - Laporan Keuangan OPD sesuai SAP - Persentase pemenuhan Area Penilaian MR 	BB (72) 100% 100% 40%	15.101.905.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi SAKIP - Cakupan pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja PD - Laporan Keuangan OPD sesuai SAP - Persentase pemenuhan Area Penilaian MR 	BB (72) 100% 100% 60%	15.101.905.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	100 %	7.428.978.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	100 %	7.428.978.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100 %	713.630.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100 %	713.630.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	1.385.190.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	1.385.190.100	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.085.634.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.085.634.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas	100 %	259.478.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas	100 %	259.478.400	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	228.994.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	228.994.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

INSPEKTORAT KAB. GROBOGAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kab. Grobogan

Dalam rangka mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD maka rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

Sasaran : Meningkatnya fungsi pengawasan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Renja tahun 2024 ini, Inspektorat Kabupaten Grobogan merencanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 15.450.578.000,- Dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kab. Grobogan kecuali untuk kegiatan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Grobogan Tahun 2025.

Berikut disajikan pada tabel 3.2 rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Inspektorat Kab. Grobogan

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7			
5.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase hasil penjaminan kualitas penilaian Kapabilitas APIP - Persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	Kab. Grobogan	- 60% - 60%	264.328.000	DAU		- 60% 60%	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP - Jumlah Temuan dan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti - Periode Pengawasan Pungutan Liar	Kab. Grobogan	- Level 3 - 204 Temuan - 12 bulan	264.328.000	DAU		- Level 3 - 204 Temuan - 12 bulan	325.000.000
	- Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Grobogan	2	153.020.000	DAU		2	225.000.000
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Grobogan	48	111.308.000	DAU		48	100.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah dokumen Manajemen Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	48 Dok	84.345.000	DAU		48 Dok	200.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kab. Grobogan	48 OPD	46.975.000	DAU		48 OPD	115.000.000
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun PD	Kab. Grobogan	48 PD	46.975.000	DAU		48 PD	35.000.000
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kab. Grobogan	48 PD	37.370.000	DAU		48 PD	85.000.000

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Grobogan	48 PD	19.800.000	DAU		48 PD	45.000.000
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Grobogan	4 Kegiatan	17.570.000	DAU		4 Kegiatan	40.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Evaluasi SAKIP - Cakupan pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja PD - Laporan Keuangan OPD sesuai SAP - Persentase pemenuhan Area Penialain MR	Kab. Grobogan	BB (72) 100 100 62	15.101.905.00 0	DAU		BB (72) 100 100 62	19.475.00.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Grobogan	100 %	7.428.978.000	DAU		100 %	8.800.000.000
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Grobogan	55	7.428.978.000	DAU		55	8.800.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Kab. Grobogan	100	713.630.000	DAU		100	800.000.000
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Grobogan	55	0			55	100.000.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Grobogan	40	529.110.000	DAU		40	400.000.000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Grobogan	55	184.520.000	DAU		55	300.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Grobogan	100%	1.385.190.100	DAU		100%	2.117.500.000

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Grobogan	10	10.218.400	DAU		10	15.000.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Grobogan	12	119.512.500	DAU		12	175.000.000
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Grobogan	12	20.848.000,	DAU		12	35.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Grobogan	4	9.780.000	DAU		4	10.000.000
	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Grobogan	12	100.784.200	DAU		12	120.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Grobogan	750	1.124.047.000	DAU		750	1.762.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Kab. Grobogan	100	5.085.634.500	DAU		100	1.500.000.000
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Grobogan	1	4.978.400.000	DAU			0
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Grobogan	60	107.234.50	DAU		1	1.500.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas	Kab. Grobogan	100	259.478.400	DAU		100	282.500.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Grobogan	12	13.700.000	DAU		12	17.500.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Grobogan	12	129.350.000	DAU		12	130.000.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Grobogan	12	116.428.400	DAU		12	135.000.000

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	100	228.994.000	DAU		100	475.000.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Grobogan	16	178.468.000	DAU		16	400.000.000
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Grobogan	2	20.370.000	DAU		2	35.000.000
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Grobogan	135	30.156.000	DAU		135	40.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
KAB. GROBOGAN

Rencana kerja untuk tahun 2024 , program dan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kab. Grobogan pada dasarnya masih tetap mengacu pada rencana tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Rencana program dan kegiatan Inspektorat Kab. Grobogan dibuat berdasarkan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021.

Adapun kajian program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

1. Administrasi keuangan perangkat daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e. Penyediaan bahan/material
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- b. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
- 5. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 6. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:

- 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan:
 - a. Kerjasama pengawasan internal
 - b. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan:

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

BAB V PENUTUP

Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kab. Grobogan Tahun 2021-2026, disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Grobogan Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah - kaidah pelaksanaan

Renja Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang menghubungkan antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kab. Grobogan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Grobogan Tahun 2024 untuk mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


INSPEKTUR
KABUPATEN GROBOGAN
MOCH. SUSILO, SH.MM, CFA, CGCAE, QRGF
Pembina Utama Muda
NIP.19650908 199103 1 005